



Upaya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pamong di Kalurahan Condongcatur

Ashar Abdillah¹, Adji Suradji Muhammad²

^{1,2}Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta, Indonesia

¹ashar.abdillah15@gmail.com

²adji.suradji@apmd.ac.id

Abstrak

Kualitas layanan publik tidak terlepas dari kualitas aparatur yang memberikan layanan. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam memberikan layanan publik di tingkat desa sangat ditentukan oleh berbagai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Condongcatur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pamong untuk memberikan layanan public secara optimal. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif model Fenomonologi didukung oleh informan yang berkualitas mulai dari Lurah, Carik, Jogoboyo, Tatalaksana, Staf Kalurahan dan juga Pendamping Kalurahan. Selain informan yang berkualitas, peneliti juga menggunakan hasil observasi dan dokumentasi untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur dilakukan melalui 4 tahap utama. Pertama melalui rekrutmen yang transparan dan akuntabel, kedua melalui Bimbingan Teknis penguatan tugas dan fungsi, ketiga melalui studi lanjut dan keempat melalui pola koordinasi yang intensif.

Kata Kunci: Kapasitas, Layanan Publik, Pamong.

Abstract

The quality of public services cannot be separated from the quality of the apparatus providing the services. The limitations of human resources in providing public services at the village level are determined by various factors. This research aims to find out how the Condongcatur Village Government improves the quality of human resources who serve as officers to provide optimal public services. By using a qualitative research model, the Phenomonology model is supported by qualified informants starting from the Village Head, Carik, Jogoboyo, Management, Village Staff and also Village Assistants. Apart from qualified informants, researchers also use observation results and documentation to support the analysis. The research results show that the strategy carried out by the Condongcatur District Government is carried out through 4 main stages. Firstly through transparent and accountable recruitment, secondly through Technical Guidance to strengthen tasks and functions, thirdly through further studies and fourthly through intensive coordination patterns.

Keywords: Capacity, Civil Servants, Public Services.

1. Pendahuluan

Desa dimaknai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam konsep asas Subsidiaritas dan Rekognisi. Penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini terkait tata kelola pemerintahan yang pada dasarnya menunjukkan keterkaitan dengan tindakan yang mengarahkan, mengendalikan, serta memberikan pengaruh dalam segala urusan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aparatur pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan di desa. Dari berbagai kekhawatiran yang melanda desa dalam menyelenggarakan pemerintah tak terlepas dari masih kurangnya sumberdaya aparatur desa itu sendiri.

Pemerintah desa tentu saja tak terlepas dari pada sumber daya aparatur. Sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat profesionalisme rendah yang dapat dilihat dari indikator pelayanan yang belum optimal, penggunaan waktu, serta belum memadainya peran dan inovatif dalam menjalankan tugas. Indikasi rendahnya SDM setidaknya tercermin dari tiga hal, yakni kesejahteraan, reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) (Satria & Rosnani, 2021).

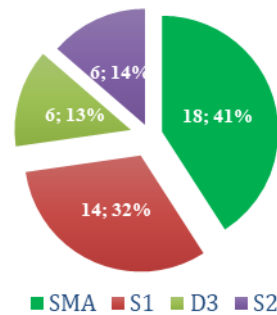
Meningkatkan pembangunan didesa tentunya tak terlepas daripada penguatan kapasitas aparatur. Dengan kapasitas aparat yang mempuni akan menunjukkan progres pemerintah desa dalam melakukan perubahan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sumber daya yang tersedia di desa baik sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana akan mempengaruhi dalam penguatan kapasitas utamanya dalam pengelolaan. Olehnya itu penguatan sumberdaya manusia, dan disiplin aparat Desa menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya kapasitas aparatur desa yang meningkat. Sementara itu ditinjau dari penelitian yang juga mengkaji terkait peningkatan kapasitas.

Pada penelitian Sitti Aminah dan Hari Prasetyo Sutanto (2018) menunjukkan Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui diklat dengan pendalaman materi disertai dengan praktik. Dekki Umamur Ra'is (2022) melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa. Dalam penelitian Ilham Zitri, dkk (2022) mengulas proses penguatan kapasitas melalui proses pendampingan Perangkat Desa. Lalu pada penelitian Susi Krisjuyani (2023) menguraikan kapasitas diukur dari berbagai indikator diantaranya kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya manusia. Tentu dalam pelaksanaan didesa sebagai upaya mewujudkan kapasitas pemerintahan desa. Dari uraian penelitian terdahulu menilai bahwasanya tolak ukur kinerja aparatur mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan, ini menjadi konsen dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintahan. Selain itu penguatan kapasitas bisa didapatkan dengan peningkatan pendidikan, pelatihan serta pendampingan bagi aparatur desa. Sementara itu kebaruan dalam penelitian ini, peneliti menkonsepsikan terkait upaya pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pamong dengan pendekatan analisa kapasitas kelembagaan.

Peneliti mengangkat pelaksanaan peningkatan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Pada pelaksanaan dapat dilihat bahwasanya pemerintah kalurahan dalam penguatan kapasitas pamong terntunya akan berdampak dalam meningkatnya tatanan pemerintahan di Kalurahan. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah kalurahan sangat

memperhatikan terkait terkait peningkatan kapasitas aparatur sebagai upaya dalam menjalankan peran penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat yang menjadi dua kata kunci penting. Hal ini terlihat dari pada tingkatan pendidikan masing-masing pamong yang rata-rata lulusan sarjana dan bahkan sampai kejenjang S2.

Data Pendidikan Pamong



Gambar 1. Rata-rata Pendidikan Pamong

Kalurahan sendiri secara penyebutan khusus untuk desa pada wilayah di DIY merujuk pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dalam penyebutan nomenklatur bagi Desa mengandung nilai-nilai lokal disebut Kalurahan, hal ini kemudian yang menarik dan berbeda penyebutannya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan daerah tersebut tentang nomenklatur sebutan Kalurahan, selain itu dalam penyebutan aparatur Kalurahan, Kepala Desa disebut Lurah, Sekertaris Desa disebut Carik, Kasi Pemerintahan disebut Jagabaya, Kasi kesejahteraan disebut ulu-ulu, Kasi Sosial Kamituwa sebagai pelaksana teknis dalam pemerintahan dikalurahan. Lanjut itu pada wilayah sekretariat kalurahan Kaur TU dan Umum disebut Tata Laksana, Kaur Keuangan disebut Danarta, Kaur Perencanaan disebut Pangripta.

2. Tinjauan Pustaka

Bicara terkait dengan kapasitas pamong kalurahan, dalam hal ini untuk stasus penyebutan aparatur desa disebut pamong kalurahan. Erat kaitannya dalam mendorong berbagai kemampuan aparatur desa dalam perwujudan pemerintah desa dalam menempatkan komponen yang harus dimiliki oleh setiap aparatur desa.

Keterampilan dan keahlian aparatur memastikan keberhasilan pelaksanaan pemerintah desa itu sendiri, oleh sebab itu kompetensi tersebut penting serta perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas menjadi suatu upaya dalam mengembangkan rangkaian gerakan perubahan multi-level bagi individu, kelompok organisasi dan system memperkuat orientasi individu dan organisasi sehingga dapat peka terhadap transformasi yang ada (Morison;2014).

Fokus dalam peningkatan kapasitas pamong kalurahan menjadi satu kesatuan yang harus ditata dalam rangka mengoptimalkan proses pelaksanaan tatanan pemerintahan. Posisi kalurahan dengan segala kompleksitas termaksud terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia dalam hal ini pamong kalurahan, penguatan tatanan pemerintahan, penataan kelembagaan yang menjadi penting dalam rujukan agar lebih ditingkatkan.

Ditinjau dari segi penguatan kapasitas kelembagaan, dalam penuturan Fauzi (2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga level peningkatan kapasitas (Tauvik et al., 2023) yaitu:

- a. Tingkatan individu (sumberdaya manusia/aparatur pemerintah) dilakukan dengan yang peningkatan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan latihan.
- b. Tingkatan lembaga, tingkatan ini diusahakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui struktur dan proses kelembagaan.
- c. Tingkatan sistem, dilakukan dengan melakukan perbaikan dibidang ketatalaksanaan yang meliputi pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam sistem tersebut.

Menurut Rozaki, dkk (2005) mengemukakan terdapat tiga asa utama organisasi desa, yaitu: (1) kapasitas desa masih terbatas terkait dengan menjalankan fungsi regulasi, pelayanan dan pemberdayaan; (2) penguatan kapasitas pemerintah desa tidak cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah; (3) kapasitas pemerintah desa merupakan sebuah esensi dari otonomi desa. Itu berarti penguatan kapasitas pemerintah desa sangatlah penting berdasarkan tuntutan global serta regulasi negara (Jennifer. R. Dhue1, 2021).

SDM pemerintah desa menjadi hal terpenting dalam melaksanakan tata pemerintahan yang ada didesa. Selain itu yang tidak kalah penting dalam memberikan motivasi kerja, pemberian reward atas kinerja bagus akan memberikan nilai dalam menguapayakan pelaksanaan tata pemerintahan yang optimal kepada masyarakat itu sendiri. Kapasitas sebagai suatu konsep dalam menganalisa sejauh mana optimalnya penyelenggaraan pemerintahan.

Pandangan Milen (2001) mengemukakan bahwasanya kapasitas ditafsirkan sebagai kapabilitas baik dari individual, organisasi dan sistem untuk mendorong dan melaksanakan tugas secara efektif dan berkelanjutan, hal tersebut menunjukkan kapasitas tidak hanya dipandang dari sudut pandang statis tetapi juga memiliki nilai dinamis yang mengalami transformasi adaptasi yang semakin cepat dan variatif (Mustari et al., 2022).

Penjabaran teori diatas mendudukan sebagaimana kapasitas sebagai pemahaman serta keterampilan secara personal dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam desa. Dalam menumbuhkan pelaksanaan pemerintah desa yang ideal tentu tak terlepas pada pengoptimalkan kapasitas perangkat desa. Dengan merefleksikan posisi desa yang terus dipandangan masih kurang pada segi tatanan pemerintahan, maka dari itu penguatan kapasitas aparatur desa menjadi poin terpenting dalam mewujudkan kontestasi pelaksanaan yang ideal sebagai upaya dalam meningkatkan penghidupan dan kehidupan kepada masyarakat itu sendiri.

Tatakelola pemerintahan yang baik dalam peruntukan mengupayakan penghidupan dan kehidupan. Tentunya tak terpelas daripada penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, selain itupula dari segi aspek pemberian motivasi seperti reward dan juga dalam bentuk lainnya menjadi acuan dalam pengimplementasian ditengah-tengah masyarakat. Banyak hal yang masih kurang khususnya dalam fermine pemerintah desa, ini masih sangat jauh dari cita-cita para pejuang dalam

menilai desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah desa harus memiliki motivasi.

3. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif, model Kualitatif Fenomonologi bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pamong untuk memberikan layanan publik secara optimal. Lokasi di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok Sleman. Adapun Informan terdiri dari Lurah, Carik, Jogoboyo, Tatalaksana, Staf, Pendamping Kalurahan. Teknik pemilihan informan yang digunakan yakni teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*). Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: identifikasi data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Kapasitas pemerintah Kalurahan Condongcatur dengan menguraikan pada konsep yang salah satunya dengan penguatan baik secara internal struktural dengan pendidikan lanjutan, prekrutan pamong, koordinasi, serta bimtek. Tentunya dalam menjalankan kapasitas desa sebagai fungsi regulasi, pelayanan dan pemberdayaan.

Pengembangan kapasitas dapat dilihat sebagai suatu proses dalam melaksanakan berbagai perubahan baik secara individu, kelembagaan dan sistem untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan. Adapun upaya dalam meningkatkan kapasitas Kalurahan Condongcatur melalui pendidikan lanjutan bagi pamong, membangun koordinasi, pula melalui kegiatan bimbingan teknis, serta pola penempatan pamong melalui proses prekrutan secara akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat uraian 4 upaya yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas pamong kalurahan diantaranya:

a. Pendidikan Lanjutan

Program Studi lanjutan yang diprioritaskan bagi Pamong dalam melanjutkan pendidikan baik D3-S3 sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pamong. Pendidikan merupakan bagian dari cara yang mendasar dalam mencapai tuntunan dan cita-cita individu, mencapai kematangan dalam peningkatan karir sehingga dibutuhkan informasi mengenai bimbingan karir.

Kebijakan yang cukup baik dalam rangka meningkatkan kapasitas Pamong, dengan mendorong Pamong untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam penuturan tersebut menunjukkan bahwasanya dengan adanya program studi lanjutan ini memperlihatkan bagaimana komitmen dari pemerintah kalurahan dalam meningkatkan kapasitas pamong yang tentunya akan memberi dampak bagi pamong dalam menjalankan tugas dalam tata pemerintah di Kalurahan. Studi lanjut ini menjadi salah satu kebijakan dalam mendorong Pamong Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan pengetahuan dalam menejerial untuk menopang tugas dan

tanggung jawab sebagai Pamong Kalurahan. Bantuan pendidikan pada program studi lanjut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pamong kalurahan dalam mengembangkan potensi akademik mereka.

b. Prekrutan Pamong

Pola prekrutan ini menjadi sebuah tindakan mencari kompetensi dalam bidang pemerintahan mengenai tugas dan fungsi di bawah manajemen sumber daya manusia dan vital memastikan memiliki personil yang berkualitas, yang mana mendukung kebijakan-kebijakan yang muaranya kepada Masyarakat itu sendiri. Dalam pola prekrutan yang menjadi fokus dalam penentuan kompetensi posisi kelembagaan Kalurahan Condongcatur berdasarkan kesesuaian komponen yang menjadi kebutuhan dalam bidang struktural pemerintahan.

c. Koordinasi

Koordinasi yang dimaksudkan yakni pada upaya dalam membangun sinergitas bersama dalam pelbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda. Pada asa kepentingan bersama sehingga di satu sisi segala kegiatan sistematis pada arah yang telah disepakati bersama. Dalam koordinasi tersebut sebagai bagian dalam memberikan masukan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan maupun evaluasi atas kinerja. Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Lurah menunjukkan sinergitas yang dibangun untuk peningkatan kinerja pamong kalurahan.

d. Bimtek

Kegiatan tersebut biasanya berupa pelatihan yang mencakup berbagai bidang, termasuk manajemen administrasi, keuangan desa, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya. Sebagai langkah dalam meningkatkan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur yang berpatokan pada kompetensi di setiap bidang. Salah satunya melalui kegiatan bimtek yang bekerjasama dengan instansi terkait. Kegiatan tersebut di dasari kebutuhan yang dirasakan perlu untuk lebih dioptimalkan. Hal itu dalam keterampilan individu yang mencangkup prospek kognitif diantaranya terkait pemahaman dan kemampuan menjadi suatu komitmen, motivasi serta konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan Bimtek menjadi salah satu obsi dalam meningkatkan kapasitas pamong kalurahan. Sebagaimana dalam penjelasan di atas yang tak hanya terfokus bagi kasi saja melainkan pula staf dalam meningkatkan kompetensi dari segi pengetahuan akan ketugasannya di struktural pemerintahan itu sendiri. Selain dari kegiatan Bimtek juga pada pola pendampingan dari Kepala seksi kepada staf-staf dalam menopang perbaikan-perbaikan sebagai Upaya meningkatkan kapasitasnya. Dimensi peningkatan kapabilitas SDM aparatur mengupayakan pada keberadaan tenaga yang ahli dan memahami secara teknis, yang dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, serta lingkungan kerja yang baik, pula melalui rekrutmen. Oleh sebab itu sangat penting dalam upaya pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM agar tercapai tujuan organisasi.

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas. Kemampuan dalam manajemen yang meliputi manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, dan manajemen

keuangan. Sedangkan kemampuan tersebut sebagaimana dalam analisa kapasitas kelembagaan yang dibangun secara individu, kelembagaan serta sebuah sistem yang dibangun. Kemampuan tersebut meliputi penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan desa (perdes), dan pelayanan publik. Sebagaimana yang diupayakan di Kalurahan Condongcatur sendiri dalam memaksimalkan kemampuan bagi pamongnya melalui pendidikan, pelatihan, membangun koordinasi serta sistem prekrutan berdasarkan kompetensi pamong yang dimiliki.

Ditinjau dari segi penguatan kapasitas kelembagaan, dalam penuturan Fauzi (2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga level peningkatan kapasitas.

- a. Kemampuan individu pada penguatan bagi pamong sendiri berdasarkan dari hasil penelitian diantaranya yakni melalui kegiatan bimbingan teknis, pula pendidikan lanjutan bagi pamong. Konsep tersebut yang kemudian diharapkan meningkatkan kapasitas individu-individu pamong sebagai upaya dalam membangun kompetensi serta pemahaman akan pelaksanaan tupoksinya masing-masing. Membangun kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas dengan baik demi menciptakan kolerasi antara pemerintah dengan Masyarakat.
- b. Tingkatan lembaga yang dibangun pada penempatan posisi pamong berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Hal ini melalui sebuah sistem yang dibangun dengan melaksanakan prekrutan terbuka dengan melibatkan kedua institusi kampus yakni UNY dan AMIKOM sebagai pelaksana teknis dalam menjaring pamong yang memiliki kompeten. Kebijakan tersebut diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, baik secara pelaksanaan tugas maupun dalam melayani masyarakat.
- c. Tingkatan sistem yang dilakukan dengan membangun komunikasi yang melalui koordinasi antar sesama pamong. Tentunya selain membangun sebuah komunikasi pula sinergitas yang meliputi ketatalaksanaan yang optimal, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Koordinatif yang dilaksanakan baik secara horizontal maupun vertical dalam membangun sinergitas sebagaimana dalam rangka membangun kompetensi baik pamong maupun secara pelaksanaan program-program itu sendiri. Dalam membangun kompetensi yang dibangun tak hanya dari segi pelaksanaan tugas melainkan banyak hal yang mesti dibangun seperti ketersediaan SDM sekaligus kemampuan teknologi dan informasi.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas pamong secara kelembagaan dalam mengaktualisasikan berbagai kemampuan yang diharapkan yakni kemampuan dalam memahami kebijakan, kecakapan dan keterampilan, dari penjabaran tersebut secara garis besar yang diambil yaitu terkait dengan kemampuan pamong dalam memenejerial pemerintahannya.

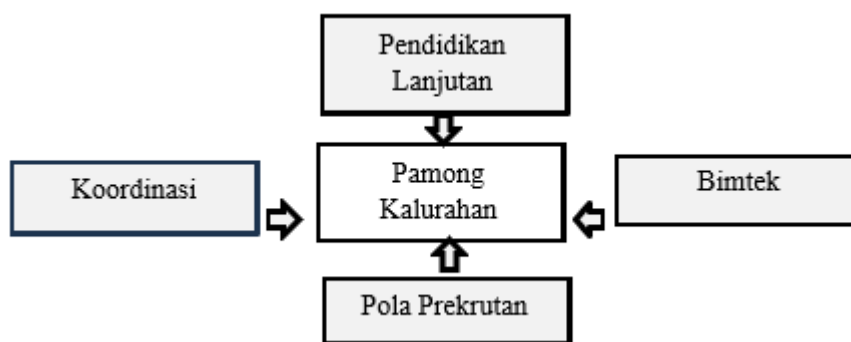
Kemampuan dalam menjalankan berbagai kebijakan atau program serta runut aturan dari pemerintah pusat, akan terasa sangat kurang ideal dalam melaksanakan jikalau kapasitas yang masih kurang. Oleh sebab itu sangat penting untuk terus membangun sebuah sistem secara terpadu dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi setiap pamong kalurahan atau perangkat desa secara keseluruhan.

Pengembangan kompetensi sendiri tak hanya melalui pendidikan ataupun pelatihan, hal itu pula dimulai dari saat proses penjaringan posisi pamong dalam struktural melalui rekrutmen dengan menggandeng institusi sebagai bagian dari pelaksana teknis dalam melakukan seleksi pamong yang betul-betul mempunyai kompeten juga kapabel dalam jabatan yang dibutuhkan. Sementara

itu dari segi penguatan kapasitas seringkali masih banyak hal-hal yang masih kurang dalam memaksimalkan aspek dalam menguatkan kapasitas pamong Kalurahan Condongcatur.

Dimensi pengembangan kapasitas SDM aparatur menitikberatkan pada ketersediaan tenaga yang profesional dan memiliki kemampuan secara teknis, yang dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan, pengupahan, kondisi lingkungan kerja yang kondusif, dan rekrutmen. Pentingnya penyelenggaraan program pengembangan kapasitas SDM agar tercapai ideal dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dari ulasan tersebut dari hasil penguatan kapasitas kelembagaan bagi pamong kalurahan di Condongcatur, dengan pendekatan analisis pada level peningkatan kapasitas. Maka dapat diuraikan kedalam ulasan berupa bagan analisa sebagai berikut.



Gambar 2. Pola Penguatan Kapasitas Kalurahan Condongcatur

Sumber: diolah Penulis dari analisa kapasitas kelembagaan

Pola di atas menunjukkan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur melalui 4 upaya yakni pendidikan lanjutan, koordinasi, bimtek, rekrutmen pamong. Pola tersebut menunjukkan dalam upaya penguatan kapasitas dalam pemerintahan secara kelembagaan baik dari segi individu, lembaga serta sistem. Kapasitas secara individu melalui pendidikan, serta kegiatan bimbingan teknis. Kemudian dari segi kelembagaan melalui pengembangan posisi pamong berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Aspek selanjutnya yakni dari segi membangun sebuah sistem dalam pemerintahan, pada pemerintahan Condongcatur sendiri mengupayakan membangun koordinasi yang notabeneanya akan berpengaruh terhadap sinergitas antar struktural pemerintah.

Konsep tersebut yang mesti menjadi rujukan dalam peningkatan kapasitas secara kelembagaan pemerintahan. Suatu yang menarik yang menjadi kebijakan dari pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam prekrutan pamong dengan melibatkan institusi sebagai pelaksana teknis dalam menyeleksi pamong-pamong yang betul-betul mempunyai kompetensi. Dengan pola prekrutan yang membentuk tahapan diantaranya mulai dari seleksi berkas, wawancara, sampai tahapan tes tertulis yang tim penilai dari institusi kampus. Ini tentu saja menjadi sebuah Langkah yang ideal dalam menjaring pamong-pamong yang betul-betul punya kompetensi. Hal tersebut otomatis akan berpengaruh dalam penguatan kemampuan secara individu-individu bagi pamong.

Peningkatan kapasitas dikembangkan dalam meningkatkan kompetensi pamong melalui kegiatan Bimtek. Bimbingan tehnik sendiri dilaksanakan dalam meningkatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bimtek sendiri sebagai langkah dalam memaksimalkan

pelaksanaan program yang merupakan kebijakan dari kementerian maupun aplikasi yang diharapkan memaksimalkan peranan pemerintahan desa. Kemampuan dalam memutuskan serta menentukan kebijakan strategi dalam merumuskan kebijakan. Tentunya kemampuan konseptual tersebut tidak dapat mencapai titik tanpa adanya kemampuan pamong dalam membangun sebuah sistem. Maka dari itu tentu saja peningkatan kapasitas menjadi sebuah keharusan demi mewujudkan sebuah tata kelola yang baik didalam pemerintahan di Kalurahan Condongcatur.

Pengembangan kapasitas melalui peningkatan pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan diharapkan mampu memperkuat dari aspek kepemimpinan dari pada pamong itu sendiri. Dari program tersebut memberikan dampak yang signifikan dari aspek pengetahuan dalam memenejerial dalam kelembagaan sebagai pamong. Selain itu dengan pemahaman yang di dapat diharapkan mampu membangun sebuah sistem yang tentunya akan memberikan banyak dampak bagi struktural mamupun masyarakat.

5. Kesimpulan

Pengembangan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan konseptual dalam hal kecakapan dari segi pemahaman tupoksi, ini kemudian melalui pendidikan, pelatihan serta pendampingan. Proses pendampingan yang dilaksanakan melalui pendamping desa sebagai jalur koordinasi yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian memberikan uraian dengan menilai pengembangan kapasitas di Kalurahan berjalan dengan baik.

Upaya semangat belajar bagi pamong mengingat bahwasanya SDM yang menjadi pamong dan staf di Kalurahan Condongcatur dituntut memiliki kapasitas yang tinggi serta mampu menguasai teknologi yang diharapkan akan mengupayakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemahaman akan tumbuh jikalau didukung dengan cara berpikir yang progresif tanpa cenderung konservatif. Hal tersebut didapatkan dengan penguatan kapasitas baik secara peningkatan Pendidikan maupun penempatan pamong yang sesuai dengan kompetensinya. Sejatinya ada beberapa konsen sehingga kapasitas pamong penting untuk ditingkatkan dalam memahami tugas fungsi secara regulasi, pelayanan dan juga pemberdayaan.

Pemerintahan Kalurahan Condongcatur mencoba mendudukan dalam konsep pengembangan kapasitas secara individu maupun secara kelembagaan. Makna dari kapasitas secara individu ini melalui kebijakan yang di keluarkan pemerintah kalurahan dengan memberikan kesempatan kepada pamong dalam melanjutkan pendidikan mulai dari D3-S3 yang kemudian untuk segala pembiayaan di bantu oleh pemerintah kalurahan.

Kapasitas individu yang mesti dimiliki oleh pamong ialah kemampuan memahami tupoksi serta pemerataan pengetahuan, gunanya untuk mengantisipasi adanya kelambatan pada proses layanan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam membangun sinergitas antar pamong dalam artian secara pelaksanaan tugas bisa saling membantu dalam mengatasi segala permasalahan atau ketidak pemahaman dari satu kebijakan tertentu, semisal ada kebijakan baru dari kementerian dapat membangun sebuah sinergi dalam menyikapinya secara kelembagaan.

Daftar Pustaka

Ayuningtyas, D. P. (2023). Tingkat Kedisiplinan Kerja Dengan Pemanfaatan Fasilitas Kantor Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Kantor Pemerintah Desa

- Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(1), 36–44.
- Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24269/Ars.V8i1.2270>
- Ichwan, S. (2019). Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Noken*, 5(1), 81–98.
- Jennifer. R. Dhue1, F. B. T. (2021). Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Desa Di Desa Oben Kabupaten Kupang. *Jurnal Pemerintahan*, 2(2), 335–356.
- Kapriaji, M. N., & Siswidiyanto, S. (2022). Desentralisasi Dan Kapasitas Pemerintah Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 241–255. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2022.008.02.14>
- Khaidir Ali, A. S. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Krisjuyani, S. (2023). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa. *Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 198–205.
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.30651/Aks.V6i3.12963>
- Mustari, N., Sulastri, S., Sulfiyanti, S., & Syukri, U. (2022). Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Makassar Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk)*, VII(02), 82–88.
- Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Mamuju. *Jurnal Ilmiah Akademik (Pujia)*, 1(1), 145–161. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8787-Full_Text.Pdf
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210–229. <https://doi.org/10.26623/Julr.V2i2.2271>
- Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76. <https://doi.org/10.24014/Jel.V13i1.18174>
- Satria, A., & Rosnani, T. (2021). Pemberdayaan Sdm Aparatur Pemerintahan Desa. *Proceeding Seminar Bisnis*, 5, 1–11.
- Suhendar, D. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Ilmiah Neo Politea*, 1(1), 43–61. <https://doi.org/10.53675/Neopolitea.V1i1.102>
- Syahrudin Hattab, Daswati, R. (2022). Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pembangunan Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *Sikemas Journal*, 1(2022), 23–30.
- Tamam, B. (2023). Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia Pendahuluan. *Annual Conference On Islam, Education, And Humanities*, 2, 109–124.
- Tauvik, I., Endah, K., & Mutholib, A. (2023). Kapasitas Perangkat Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. *Repository Unigal*, 3(1), 278–290.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323–344. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol48.No2.1666>

- Untari, S., Habibi, M. M., Mu, A., Fauziah, L. N., & Ardhana, A. (2022). Capacity Of Village Apparatus In Implementing Village Government Administration. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi (Jpds)*, 5(2), 80–87.
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 591–606.